

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, KOMPETENSI APARATUR DAN
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA KARYAWAN DI BPKAD KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PADA BPKAD KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI



1519210083

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI,
KOMPETENSI APARATUR DAN PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI
BPKAD KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS
PADA BPKAD KOTA PALEMBANG)**

Nanda Meidiyana

1519210083

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi aparatur dan pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja karyawan di BPKAD Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif menggunakan kuisisioner sebanyak 57. Kuisisioner tersebut disebar dan diisi oleh karyawan BPKAD Kota Palembang yang menggunakan aplikasi google form. Pada penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk metode analisis datanya menggunakan regresi liner berganda, uji T dan uji F. Hasil dari penelitian ini dimana pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi aparatur dan pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di BPKAD Kota Palembang.

Kata Kunci : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja Karyawan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era era globalisasi saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk berkompetisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pemerintahan adalah sumber daya manusia, yaitu karyawan yang berkualitas. Karyawan merupakan salah satu aset pemerintah yang tidak ternilai besarnya, sehingga pengelolaan karyawan yang baik akan menghasilkan kinerja karyawan yang baik dan berpengaruh terhadap kemajuan sebuah pemerintah daerah.

Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggung jawabkan (Mohamad, 2016: 4). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017: 20).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan betapa pentingnya kinerja karyawan bagi pemerintahan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari sifat yang dimiliki masing-masing individu, seperti motivasi kerja, kemampuan dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan kerja seperti perlakuan dari rekan kerja dan pimpinan, penghasilan diperoleh serta fasilitas kantor (sarana dan prasarana).

Untuk menunjang peningkatan kinerja karyawan, maka pemerintah perlu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat membantu pekerjaan karyawan agar efektif dan efisien, diantaranya penerapan sistem informasi. Seiring dengan perkembangan di era globalisasi ini, agar dapat bersaing dengan pemerintah daerah lainnya maka penggunaan sistem informasi yang baik sangat dibutuhkan, salah satunya dalam kegiatan akuntansi.

Menurut Jogiyanto (2010:227), sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem dimana mampu mengolah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan untuk keperluan para pemakainya.

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari lima komponen, yaitu orang-orang (people), prosedur-prosedur (procedure), data (data), perangkat lunak (software), dan infrastruktur teknologi informasi (information Technology infrastructure). Selanjutnya, dari kelima komponen tersebut memungkinkan Sistem Informasi Akuntansi memenuhi tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas organisasi, menghasilkan

yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan, dan sebagai pengendalian internal organisasi (Romney & Steinbart, 2011).

Apabila dalam suatu pemerintahan menggunakan sistem informasi akuntansi yang tidak memadai maka pemerintahan tersebut tidak dapat memproses semua transaksi dengan benar sehingga informasi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya. Apabila pemerintah tidak mampu menghasilkan informasi dengan benar maka akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya pengendalian intern dalam pemerintah daerah. Pengendalian intern dalam pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan intern yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang

optimal, sehingga peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang semakin nyata, dalam memberikan masukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam menghadapi permasalahan yaitu profesionalitas aparatur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor dan pedoman/peraturan tentang pengelolaan keuangan dan Aset daerah.

Isu tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) mendapat perhatian yang cukup besar belakangan ini dari BPK selaku auditor eksternal selalu menguji kekuatan SPI di setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan luas lingkup pengujian yang dilaksanakannya. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang telah meraih dua kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga Pemerintah Kota Palembang tercepat kedua dalam mengumpulkan laporan keuangan (djp.kemenkeu.go.id).

Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang sangat baik dan transparan sehingga Pemerintah Kota Palembang sudah meningkatkan laporan keuangannya sehingga berhasil meraih WTP.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kota Palembang

Tahun Anggaran	Opini yang diperoleh dari BPK
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2016-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terhadap LKPD Kota Palembang mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2017. LKPD Kota Palembang mendapat opini WTP, tentunya mendapat opini WTP selama 2 tahun berturut-turut merupakan suatu prestasi bagi Pemerintah Kota Palembang.

Kemudian hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti adalah terdapat kasus yang pernah terjadi atas pemeriksaan ikhtisar laporan keuangan BPK pada saat tahun 2019 yaitu terjadinya keterlambatan dalam pembayaran tagihan proyek yang belum di bayar oleh pemerintah kota palembang yaitu Adanya keterlambatan pembayaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada pihak ketiga menyebabkan keresahan di kontraktor yang memiliki tagihan di BPKAD. Salah satu kontraktor yang namanya tidak ingin disebutkan, menyatakan keterlambatan pembayaran hingga empat sampai lima minggu.

Pasalnya, saat melakukan penagihan baik uang muka dan lainnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota palembang dalam pengerjaan proyek 2019, tidak ada dana yang dapat dicairkan. Bahkan

mereka mengaku, sudah hampir satu bulan tidak ada pencairan. Mirisnya lagi, mereka menyebut pihak pemerintah terkesan mempersulit mulai dari pemberkasan sampai pencairan. “Kami mendapatkan info dari salah satu pegawai BPKAD, jika penagihan akan dibayar pada tahun depan pada bulan Februari,” ungkap salah satu kontraktor saat melakukan penagihan ke kantor BPKAD kota Palembang, Kamis (28/11/2019). Dia berujar, APBD 2019 Palembang dikabarkan mengalami defisit dan pihaknya pun merasa pasrah “Kondisi sekarang sama seperti tahun 2015. Mau bagaimana lagi, kita hanya bisa menunggu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kota Palembang, Ahmadi, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi perihal yang diributkan oleh kontraktor yang mengatakan adanya defisit. “Kan belum final, BPKAD menerima laporan keuangan dari Dinas Pajak. Mereka masih menagih jatuh temponya Desember mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang, Sulaiman Amin, menyebutkan, untuk tahun ini realisasi perolehan pajak sudah mencapai 60 persen dengan target Rp 1.3 Triliun. “Harapan kita dengan belajar sistem yang ada ditahun ini akan menjadi pengetahuan kita untuk mengoptimalkan PAD. Untuk tahun 2020, PAD kota Palembang naik Rp 300 Miliar menjadi Rp. 1.5 Triliun, maka dari itu kita telah menyiapkan strategi khusus dengan melakukan On The Track,” tukasnya. (LP/Intens.news).

Dengan adanya kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pengendalian Internal yang dijalankan masih belum maksimal. Maka, kompetensi aparatur yakni sumber daya manusia belum secara maksimal dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pemanfaatan sistem informasi yang digunakan dapat meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh karyawan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian seberapa besar Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Kinerja Karyawan di BPKAD Kota Palembang bisa mendapat opini WTP.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yunita (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhitama (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) tentang pemanfaatan sistem informasi yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, transparansi.

Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut Baldrick (2017:63) Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik akan mendorong karyawan lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik.

Disatu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik (Abdul, 2016: 56).

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016) hasil penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh

terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dari Risdhayanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.

Sama halnya dengan penelitian dari Hari dan Muhammad (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun berbeda dari Penelitian Shinta, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan di dinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian dari Lucy, dkk (2014) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan

pemerintahan daerah. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian **“PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KOMPETENSI APARATUR DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI BPKAD KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA BPKAD KOTA PALEMBANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kinerja karyawan?
3. Apakah pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja karyawan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup dalam penelitian ini hanya menjelaskan mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi aparatur dan pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja karyawan pada BPKAD di Kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Karyawan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Karyawan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi (sia), kompetensi aparatur dan pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja karyawan di BPKAD kota Palembang serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi STIE MULTI DATA PALEMBANG.

2. Bagi BPKAD Kota Palembang

Hasil penelitian ini menjadi bahan informasi serta salah satu masukan bagi pemerintah kota palembang dalam rangka menerapkan pemanfaatan

sistem informasi akuntansi (sia), kompetensi aparatur dan pengendalian internal pemerintah guna meningkatkan kinerja karyawan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan pengertian teori-teori dari akuntansi, kapasitas sumber daya manusia ,pemanfaatanteknologi informasi, sistem pengendalian intern akuntansi dan kualitas laporan keuangan keuangan. Selain itu ada juga penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, Sampel dan

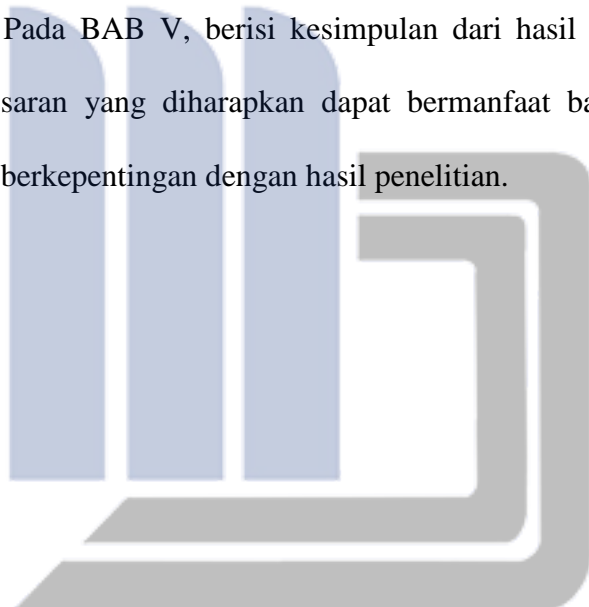
populasi ,jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional ,dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV, penulis akan menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis dan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Faishol. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. (Volume I No.3, Oktober 2016).
- COSO. 2013. *Internal Control–Integrated Framework: Executive Summary*, Durham. North Carolina. May 2013.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh.
- Kadek Desiana Wati, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Buleleng*. EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
- Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1), April 2016
- Nurmalia Hasanah Dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. 2016. Penerbit In Media.

- Pramono Hariadi, dkk. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta. Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta
- Silviana. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Profita. Volume 6. No.1. April 2014.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta : Bandung.
- Sujarweni Wiratna V. 2015. *Sistem Akuntansi*, 1nd ed, Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Tuti Herawati. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Kinerja*.
- STAR – Study & Accounting Research. Vol XI, No. 1 – 2014
- . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berbasis Akrual*.